

# KEBIJAKAN FORMULASI PERINGANAN PIDANA BAGI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh:

**I GST AGUNG KADEK SURYANANTA<sup>1</sup>**

**Komisi Pembimbing**

**Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., MH. dan Dr. Prija Djatmika, S.H., MH.**

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya  
Jalan M.T. Haryono No 19 Malang, Jawa Timur, Indonesia  
Email: agungsuryananta@yahoo.co.id

## Absrtact

---

*Scientific article discussed on policy formulations criminal witness palliation for seniors cooperate in uncover corruption in indonesia. Indonesia is a country law must be based on legal certainty (rechtssicherheit), benefit (zweckmassigkeit) and justice (gerechtigkeite). This research is based on the importance of protection for witnesses investors who collaborated (justice collaborator) in unload a corruption. With regard to the establishment legislation number 13 years 2006 about witness protection and the is not yet fully answer to the matter witness protection itself. Law enforcement in protection for witnesses investors who collaborated (justice collaborator), often have no legal protection because legislation number 13 years 2006 about witness protection and the not giving the legal basis strong in an effort to provide legal protection. Especially in undang-undang number 13 years 2006 in article 10 paragraph 2, because this article not meet the protection against a justice collaborator, where was still will be sentenced to crime and not at all gives firmness to witnesses investors (justice collaborator) that obtain lightening. This paper made based on research normative, with the approach legislation regulation, approach compariso , review research shows criminal palliation could become alternatives in uncover corruption with awarded (rewards) and criminal imposition against a witness investors who collaborated (justice collaborator) should not exceed 2/3 of maximum crimes charged .*

**Key words:** *Justice Collaborator, The palliation of criminal, Crimes of Corruption.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2013.

## Absrtak

---

Artikel ilmiah ini membahas tentang kebijakan formulasi peringanan pidana bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia. Indonesia sebagai Negara hukum haruslah berlandaskan kepada kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Penelitian ini dilakukan berdasarkan pentingnya perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam membongkar suatu tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban ternyata belum sepenuhnya menjawab masalah perlindungan saksi itu sendiri. Penegakkan hukum dalam perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), seringkali tidak mendapat perlindungan hukum disebabkan karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya memberikan perlindungan hukum. Terutama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 10 Ayat (2), karena pasal ini tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang *Justice Collaborator*, dimana yang bersangkutan tetap akan dijatuhi hukuman pidana dan sama sekali tidak memberikan ketegasan untuk para saksi pelaku (*Justice Collaborator*) agar memperoleh keringanan. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, hasil kajian dari penelitian menunjukkan peringanan pidana dapat dijadikan alternatif dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan memberikan penghargaan (*reward*) dan penjatuhan pidana terhadap seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum tindak pidana yang didakwakan.

**Kata kunci:** *justice collaborator*, peringanan pidana, tindak pidana korupsi

## Latar Belakang

Di era globalisasi dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, transportasi dan telekomunikasi, munculnya kejahatan-kejahatan khususnya dalam tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) meningkat. Untuk mengatasinya tidaklah cukup hanya dilakukan oleh penegak hukum secara sendiri-sendiri, melainkan juga dibutuhkannya kerjasama dengan pelaku yang bersedia memberikan kesaksian dalam mengungkap tindak pidana.

Indonesia sebagai Negara hukum juga perlu memahami dengan perkembangan Negara-negara lain yang telah banyak memperhatikan perlindungan terhadap saksi dan korban diantaranya Amerika Serikat yang diatur

dalam Undang-undang perlindungan saksi tahun 1984, memberikan perlindungan bagi saksi maupun orang terkait dalam ancaman maupun intimidasi.<sup>2</sup> Di Afrika Selatan Undang-undang perlindungan saksi yang dibentuk tahun 1996 yang mandatnya adalah melindungi saksi yang terancam keselamatannya.<sup>3</sup>

Pada tanggal 11 agustus 2006 lahirlah Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan suatu terobosan baru dalam upaya perlindungan bagi saksi dan korban. Saksi yang dimaksud adalah seseorang atau lebih sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.<sup>4</sup> Sehingga dalam proses peradilan pidana keterangan saksi sangat penting dan sering kali para aparat penegak hukum kesulitan untuk mencari seorang saksi dikarenakan dengan keterbatasannya perlindungan keamanan. Hukum Negara kita telah menjelaskan keterangan saksi memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil, maka dari itu Pasal 184 ayat (1) KUHAP keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama, dan dilanjutkan dengan bukti lain seperti keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Harus diakui terungkapnya suatu perkara pelanggaran hukum cenderung dikarenakan informasi dari masyarakat. Demikian juga di dalam proses ditingkat kejaksaan sampai pada ditingkat pengadilan, keterangan saksi adalah suatu alat bukti utama yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang dimana bersalah atau tidaknya terdakwa. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan seorang saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.<sup>5</sup> Di saat saksi akan memberikan keterangan, seharusnya saksi memperoleh suatu jaminan atas dirinya

---

<sup>2</sup> Muhadar, dkk, **Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 99.

<sup>3</sup> Supriadi Widodo Eddyono, **Saksi sosok yang terlupakan dari system peradilan pidana, koalisi perlindungan saksi dan ELSAM**, 2006, hlm. 8.

<sup>4</sup> Hari Sasangka dkk, **Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana**, Sinar Wijaya, Surabaya, 1996, hlm. 19.

<sup>5</sup> Surastini Fitriasih, **Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil**, <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53>, diakses 23 Maret 2015 pukul 16.00 WIB.

maupun keluarganya agar pada saat memberikan kesaksian, saksi tidak merasa takut yang dimana telah diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Hak Saksi dan Korban.

Pembahasan dalam penulisan tesis ini akan membahas lebih dalam tentang seorang pelaku yang bekerjasama untuk memberikan kesaksian dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Seorang pelaku yang bekerjasama dalam memberikan kesaksian untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu secara eksplisit diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi pengertian yang lebih jelasnya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) memang telah diatur di dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>6</sup>

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas keberadaan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sangatlah diperlukan dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Keberadaan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), kita dapat dengan cepat mengungkap suatu tindak pidana yang sedang terjadi. Tindak pidana yang sedang marak terjadi di Negara kita yaitu korupsi dan berikut data yang terkumpul berdasarkan hasil tindak pidana korupsi yang terjadi lima tahun terakhir, sebagai berikut:

**Tabel 1. Tabulasi Data Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2010-2015 (per 27 Februari 2015)**

Penindakan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Penyelidikan	54	78	77	81	80	19	389

---

<sup>6</sup>Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.sebagai berikut : (1). Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya. (2). Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Penyidikan	40	39	48	70	58	8	263
Penuntutan	32	40	36	41	45	4	198
Inkracht	34	34	28	40	40	4	180
Eksekusi	36	34	32	44	48	5	199

**Sumber: Acch.kpk.go.id**

Berdasarkan tabel tabulasi data tersebut, tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara ini setiap tahunnya mengalami peningkatan dan praktik korupsi sudah sedemikian parahnya hingga merambah ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Korupsi dapat diartikan dengan penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Dilihat dari segi represif, kesukaran memberantas tindak pidana korupsi terletak pada kesulitan dalam hal membuktikan kejahatan korupsi disidang pengadilan.<sup>7</sup> Tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan kerugian Negara atau perekonomian Negara. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia masih banyak yang belum terselesaikan ataupun dalam penjatuhan putusan tidak sesuai dengan harapan. Searah dengan perjalanan untuk memberantas korupsi di Indonesia, telah banyak terobosan hukum atau strategi yang digunakan dalam penegakan hukum. Salah satu terobosan baru yang kini sering kita dengar dikenal dengan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yaitu dengan memberikan perlindungan hukum yang tidak hanya sebatas fisik melainkan juga penghargaan (*reward*), biasanya diberikan kepada salah seorang tersangka/ terdakwa yang peranannya paling ringan dan dapat dijadikan sebagai saksi dalam perkara yang sama jika ia dapat membantu mengungkap tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan hal itu perlu dilakukan analisa mengenai Apakah dengan memberikan peringanan pidana bagi saksi pelaku yang bekerjasama dapat dijadikan upaya dalam mengungkap tindak pidana korupsi serta Bagaimana

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 12.

kebijakan formulasi peringanan pidana bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Penulisan jurnal hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang – undangan serta pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Peraturan Bersama Antara Menkumham RI, Jaksa Agung RI, KAPOLRI, KPK RI, Ketua LPSK , No: M.HH-11 .HM.03.02. Th.2011, No: PER-045/A/JA/12/2011, No: 1 Tahun 2011, No: KEPB-02/01- 55/12/2011, No: 4 Tahun 2011\_, *United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC* (Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi), *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime/ UNCATOC* (Undang– Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir), Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban, Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, dan kasus – kasus hukum terkait penelitian, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan ensiklopedia. Bahan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan tema permasalahan yang telah dikemukakan kemudian dikaji secara mendalam.

## Pembahasan

### A. Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Berbicara tentang saksi pelaku yang bekerjasama atau disebut dengan *justice collaborator* di setiap Negara memiliki sebutan yang berbeda-beda. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime*, saksi dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu *justice collaborator*, saksi korban, dan saksi jenis lainnya. *Justice collaborator* telah dikenal di beberapa Negara dengan penyebutan yang berbeda-beda seperti *cooperating witnesses* (saksi yang bekerjasama), *crown witnesses* (saksi mahkota), *witnesses collaborators* (saksi kolaborator), *justice collaborator*, *state witnesses* (saksi Negara). Dalam statusnya sebagai saksi *justice collaborator* termasuk golongan utama dalam perlindungan saksi.<sup>8</sup> 175 Berdasarkan pengertian tentang *justice collaborator* program perlindungan saksi yang selama ini diterapkan di berbagai Negara cenderung digunakan individu melindungi individu yang berperan sebagai informan bagi kepolisian. Aparat penegak hukum semakin bergantung pada kesaksian, bantuan kerja sama, dan petunjuk mengenai bukti-bukti yang diberikan oleh sesama pelaku untuk melawan teman sendiri. Semakin terlibat informan tersebut dalam tindak pidana, semakin bergunalah bantuan informan dikarenakan ia tidak hanya melihat, mendengar, atau mengalami saja melainkan mengetahui motif tindak pidana dan bahkan ikut melakukannya.<sup>9</sup>

Saksi mempunyai suatu peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, dikarenakan keterangan seorang saksi sangat berguna dalam meyakinkan hakim terhadap tindak pidana yang terjadi. Di dalam memberikan kesaksian terkadang saksi dalam memberikan keterangannya tidak maksimal dikarenakan berbagai faktor seorang saksi merasa takut memberikan kesaksiannya dikarenakan dapat membahayakan dirinya ataupun keluarganya. Lahirnya Undang-undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban belum cukup membuat seseorang merasa aman untuk memberikan kesaksian. Bila dilihat dalam

---

<sup>8</sup> *United Nations on Drugs and Crime, The Good Practices for the Protections of Witnesses in Criminal Proceedings involving Organized Crime*, New York, United Nations, 2008, hlm. 19.

<sup>9</sup> Howard Abadinsky, *Organized Crime, Ninth Edition*, Belmont, Wadsworth, Cengage Learning, 2007, hlm. 383.

prakteknya keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana banyak bergantung kepada ketersediaan dan keberanian seseorang untuk menjadi saksi.

Berkembangnya tindak pidana dalam kejahatan terorganisir, korupsi, terorisme serta tindak pidana lainnya. Negara-negara lain mengadopsi kebijakan-kebijakan untuk melindungi saksi-saksi yang bekerjasama dengan penegak hukum. Kesaksian seorang *justice collaborator* merupakan salah satu alat dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir. Melihat keberadaan *justice collaborator* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melahirkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (selanjutnya disebut sebagai UNTOC) yang diadopsi pada tanggal 15 November 2000.<sup>10</sup> Menurut Pasal 24 UNTOC, Negara-negara anggota perlu melakukan upaya-upaya yang pantas untuk memberikan perlindungan yang efektif dari pembalasan atau intimidasi bagi saksi yang memberikan kesaksiannya dalam perkara yang melibatkan kejahatan transnasional terorganisir. Upaya yang dimaksud termasuk perlindungan fisik, relokasi dan kerahasiaan atau pembatasan pengungkapan identitas dan lokasi saksi dan penerapan peraturan pembuktian yang mengizinkan pemberian kesaksian dengan cara yang memastikan kesaksian.<sup>11</sup>

Tindak pidana yang sedang maraknya terjadi adalah tindak pidana korupsi. Korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dalam menyelesaikan atau mengungkap suatu tindak pidana korupsi salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah bekerjasama dengan

<sup>10</sup> United Nations, **Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)**, (General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000). Konvensi ini di ratifikasi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Persekutuan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir).

<sup>11</sup> Perlindungan korban dan/ atau saksi juga dibahas dalam protocol yang melengkapi UNTOC, yaitu Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children atau protocol untuk mencegah, menindas, dan menghukum perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak, Pasal 6 dan 7, serta Protokol against the smuggling of migrants by land, sea and air atau protocol melawan penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara Pasal 5 dan 16.



saksi pelaku yang bekerjasama atau dikenal dengan istilah *Justice collaborator*. saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) memiliki peranan yang sangat baik dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap atau membongkar tindak pidana yang dilakukan bersama sama atau korporasi seperti tindak pidana korupsi. Dalam pembahasan diatas telah dijelaskan bahwa saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah salah satu orang yang ikut berperan dalam tindak pidana yang dilakukan tersebut akan tetapi bukan pelaku utama, sehingga seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dapat dijadikan sumber informasi dalam mengungkap tindak pidana.

Adapun kebijakan hukum pidana saat ini baik yang berasal dari dokumen internasional maupun nasional yang memberikan pengaturan berkaitan dengan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) sebagai berikut:

**1. United Nations Convention Against Corruption/UNCAC (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi).**

Instrumen ini merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang *Justice collaborator* dalam peradilan pidana. Pengaturan berkaitan dengan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 37 sebagai berikut :

Ayat (2) : Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3) : Setiap Negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang-orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.

**2. *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime/UNCATOC (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir).***

Demikian halnya dengan Konvensi PBB anti Korupsi, di dalam Konvensi ini juga memberikan ide pengaturan berkaitan dengan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana yakni diatur dalam Pasal 26 sebagai berikut :

Ayat (2) : Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.

Ayat (3) : Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerja sama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.

**3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Undang-Undang perlindungan saksi dan korban ini secara eksplisit tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai definisi tentang *Justice collaborator* di mana undang-undang ini hanya mengatur pengertian saksi dan pelapor tindak pidana. Pengaturan yang berkaitan dengan *Justice collaborator* diatur dalam Pasal 10 sebagai berikut :

Ayat (2) : Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

**4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.**

Latar belakang lahirnya SEMA ini adalah karena banyaknya kasus tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum namun belum adanya peraturan

perundang-undangan yang memberikan landasan hukum yang memberikan pengaturan terhadap *Justice collaborator* dalam peradilan pidana. Untuk memberikan dasar hukum maka dikeluarkanlah SEMA ini dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada hakim di Jajaran Mahkamah Agung ketika menangani seorang *Justice collaborator* dalam peradilan pidana.

Pengaturan berkaitan dengan *Justice collaborator* diatur dalam Point 9 tentang pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) adalah sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Jaksa penuntut umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku- pelaku lainnya yang mempunyai peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dapat menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :
  - i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau
  - ii. Menjatuhkan pidana penjara berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

## **5. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.**

Peraturan bersama ini dimaksudkan untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara pidana.

Sedangkan tujuan peraturan bersama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana, menciptakan rasa aman baik dari tekanan fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum; dan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif.

Adapun pengaturan berkaitan dengan *Justice collaborator* diatur dalam Pasal 1 sebagai berikut :

Point (3): Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

#### **B. Formulasi Peringatan Pidana Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dimasa Mendatang**

Memahami lahirnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia yang berlatar belakang pentingnya perlindungan saksi sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia bagi semua orang yang bersaksi dalam proses peradilan pidana. Masih banyaknya kekurangan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana dalam karya ilmiah ini penulis meneliti tentang peringatan pidana bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 ayat 2 menjelaskan bahwa:

“Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.

Keberadaan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) sangat memberikan suatu terobosan dalam mengungkap suatu tindak pidana dan telah dibuktikan oleh Negara-negara lain. Lahirnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: Peraturan Bersama Antara Menkumham RI, Jaksa Agung RI.KAPOLRI, KPK RI, Ketua LPSK , No: M.HH-11 .HM.03.02. Th.2011, No: PER-045/A/JA/12/2011, No: 1 Tahun 2011, No: KEPB-02/01- 55/12/2011, No: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama patut diapresiasi namun SEMA dan Peraturan Bersama hanyalah aturan transisi untuk menutup kekurangan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006.

## **1. Perlindungan Saksi dan Korban Serta Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Beberapa Negara.**

### **A. AMERIKA SERIKAT**

Perlindungan saksi tidak terlepas dari apa yang dinamakan saksi sebagai salah satu alat bukti di pengadilan. Hal tersebut juga berlaku di Amerika Serikat. Perlindungan saksi pertama kali muncul pada tahun 1970 di Amerika Serikat<sup>12</sup>, yang menjadi suatu prosedur hukum yang digunakan dalam membongkar organisasi kejahatan mafia. Berbicara mengenai perlindungan terhadap seorang saksi salah satu hal pokok yang akan dibicarakan adalah siapa yang dapat menjadi seorang saksi yang dapat dilindungi.

---

<sup>12</sup> Supriadi Widodo Eddyono, **saksi, sosok yang terlupakan dari sistem peradilan pidana, beberapa catatan kritis terhadap UU perlindungan saksi dan korban**, Elsam dan Koalisi perlindungan saksi, 2006.

a. Kualifikasi Saksi yang dilindungi.

Undang-undang tentang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984 memperluas kewenangan Jaksa Agung. Kewenangan ini diberikan sebagai bagian dari Undang-undang tahun 1970 tentang Kontrol atas Kejahatah Terorganisir yang dimaksudkan menyediakan perlindungan dan jaminan keamanan dengan cara memindahkan. Undang-undang tersebut juga menetapkan wewenang Jaksa Agung untuk menyediakan bantuan perlindungan bagi keluarga dan kerabat dari saksi yang dilindungi. Perlindungan terhadap seorang saksi di Amerika Serikat dapat dilakukan terhadap saksi yang berada dibawah perlindungan dan pengawasan *Bureau of Prison* atau *US Marshall Service*, yang dianggap memiliki kapasitas untuk menjadi seorang saksi karena pengetahuan atau karena informasi yang diperlukan dari dirinya mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang sedang ditangani oleh Jaksa Amerika Serikat, dan ada juga saksi yang memberikan permohonan terlebih dahulu agar dimasukkan dalam program perlindungan saksi kemudian diteliti keterkaitannya dengan tindak pidana yang sedang diusut oleh Jaksa Amerika Serikat. Namun semuanya tetap melalui jalur permohonan meskipun “lobi” yang diberikan dapat melalui permohonan atas inisiatif sendiri maupun tawaran atau lebih tepatnya permintaan dari Jaksa Amerika Serikat.

b. Bentuk-bentuk perlindungan.

Perlindungan yang diberikan adalah keselamatan terhadap diri maupun terhadap keluarga. Bentuk-bentuk perlindungan terdiri dari:

1. Tidak memberitahukan status seseorang yang berada dalam program perlindungan bagi tahanan yang diminta menjadi saksi atau memberi permohonan menjadi saksi.
2. Perlindungan atas keselamatan diri dan keluarga dan identitas baru.
3. Pengawasan lewat video
4. Perlindungan terhadap ekonomi saksi dan keluarganya.

c. Perlindungan *Justice Collaborator* di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat terdapat 4 (empat) mekanisme yang dapat digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan dan penghargaan (*reward*) bagi *justice collaborator* atau *informan witness* dalam melawan kejahatan terorganisir yakni dengan mekanisme Surat Non Target, kesepakatan tidak ada tuntutan, kekebalan dalam berbagai keadaan tertentu, dan kesepakatan bersama (*plea agreement*) sebagai bagian dari tawar menawar (*plea bargain*).

*Pertama* Surat Non Target adalah surat yang disediakan oleh jaksa bagi para saksi mata potensial. Seseorang yang menjadi sasaran penyidikan adalah mereka yang diyakini oleh jaksa atas tindak pidana itu karena bukti yang cukup. Surat non target biasanya digunakan diawal penyidikan, dan hanya untuk mereka yang memiliki keterlibatan minimal dalam tindak kriminal. Terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan banyak pihak, sehingga beberapa saksi yang mengetahui beberapa hal mengenai kejahatan, meskipun kecil atau tidak bersalah mungkin saja ragu untuk bekerjasama dengan aparat karena takut terlibat. Surat non target bukan berisikan janji dari jaksa mengurangi hukuman terdakwa yang juga pelaku, karena surat itu hanya memberikan perlindungan yang terbatas bagi saksi-saksi potensial.<sup>13</sup>

*Kedua*, kesepakatan tidak ada tuntutan adalah kesepakatan untuk tidak menuntut seorang saksi atas tindakan criminal tertentu yang terjadi sebagai imbalan dari kerjasama yang penuh dari kesaksian yang jujur. Kesepakatan tidak ada tuntutan biasanya digunakan dalam situasi dimana keterlibatan saksi dalam tindak criminal itu kecil, dan kerjasamanya dibutuhkan terhadap pihak-pihak lain yang memiliki porsi kejahatan lebih besar dalam tindak criminal tersebut.

*Ketiga*, penggunaan kekebalan dalam keadaan tertentu, digunakan sebagai *reward* seorang saksi yang berada dibawah sumpah. Baik di depan juri, penyidik yang disebut dewan juri. Kesaksian *informan witness* tidak

---

<sup>13</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, **Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia, Perbandingannya di Amerika dan Eropa**, Jurnal Saksi dan Korban Perlindungan Volume 1 No 1 Tahun 2011, hal. 98

dapat digunakan untuk menuntut yang bersangkutan dalam sebuah kejahatan dimana ia terlibat didalamnya. Biasanya mekanisme ini digunakan pada saksi-saksi yang ragu untuk bersaksi, yang memiliki informasi berharga mengenai kejahatan yang sedang diselidiki tetapi juga terlibat sedikit dengan tingkat tanggung jawab yang lebih rendah atau sebagai pemain kecil dalam kejahatan tersebut.

*Keempat*, kesepakatan kerjasama (*plea agreement*) biasanya dinegosiasikan sebagai tawar menawar (*plea bargain*) dimana terdakwa harus terlebih dahulu mengaku bersalah atas tindakan criminal yang dilakukan. Terdakwa juga siap untuk bertanggungjawab, sebagai kesepakatan tersebut terdakwa setuju untuk bekerjasama penuh dan sejujurnya dengan jaksa, termasuk mengungkapkan informasi dan bersedia memberikan kesaksian di pengadilan.

Dokumen perjanjian tawar menawar (*plea agreement*) dimasukkan ke pengadilan sebelum terdakwa hadir di hadapan hakim yang menyatakan diri bersalah. Perjanjian tawar menawar, ada beberapa prosedur yang dilakukan hakim yaitu hakim harus menanyakan terdakwa secara langsung dihadapan persidangan terbuka, memberi tahukan hak-hak terdakwa, memastikan terdakwa memahami hak-haknya, memaparkan tuduhan-tuduhannya, sifat dari perjanjian tawar menawar tersebut dan memastikan terdakwa dengan suka rela setuju untuk mengakui bersalah dibawah perjanjian tawar menawar. Hakim juga menanyakan jaksa dan terdakwa untuk memutuskan apakah ada landasan faktual untuk pengakuan bersalah ini.

Memutuskan pengurangan hukuman, panduan di Amerika Serikat memerintahkan hakim-hakim federal mempertimbangkan factor-faktor sebagai berikut: a. Tingkat kepentingan dan kegunaan dari pertolongan yang diberikan terdakwa yang bekerjasama, dengan memasukkan evaluasi jaksa mengenai pertolongan yang diberikan, b. Kejujuran, kelengkapan dan dapat dipercayainya informasi atau kesaksian yang diberikan terdakwa, c. Sifat dan keluasan bantuan yang diberikan. d. Adanya ancaman yang timbul, atau resiko ancaman yang mungkin terjadi pada



terdakwa atau keluarganya karena bantuan yang diberikan pada jaksa, e. Ketetapan waktu dari bantuan tersebut.

## **B. ALBANIA.**

Republik Albania mengatur perlindungan saksi dan *Justice Collaborator* dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan *Justice Collaborator* Republik Albania. Ketentuan umum dalam artikel 1 Undang-undang Perlindungan saksi dan *justice collaborator* Republik Albania mengatur langkah-langkah khusus cara dan prosedur perlindungan saksi dan *justice collaborator*, serta organisasi, fungsi, kompetensi dan hubungan antara badan yang bertanggung jawab atas usulan, penilaian, persetujuan dan pelaksanaan tindakan khusus perlindungan.

Dalam artikel dijelaskan tentang definisi dari:

1. *Of justice* didefinisikan sebagai orang yang mendapatkan tindakan khusus berupa perlindungan telah diterapkan, dalam hal seorang saksi memberitahukan atau bersaksi suatu fakta atau keadaan, yang merupakan bukti dalam proses persidangan tindak pidana dan bahwa karena ini informasi atau kesaksian tersebut ia berada dalam bahaya nyata, riil atau serius.
2. *Justice Collaborator* didefinisikan sebagai seorang yang sedang menjalani hukuman pidana atau seorang tersangka/ terdakwa dalam proses peradilan pidana, yang memerlukan penanganan perlindungan yang khusus karena yang bersangkutan telah bekerjasama, memberikan keterangan, dan pernyataan yang dilakukan selama proses persidangan pidana dimana yang bersangkutan mengalami situasi bahaya yang riil, dan serius.
3. *Close person* didefinisikan sebagai orang-orang yang berada dalam bahaya nyata, riil atau serius karena hubungan kekerabatan mereka berdasarkan darah atau perkawinan dengan saksi atau justice collaborator, hidup atau tinggal bersama sebagai suami istri dengan mereka.
4. *Related person* didefinisikan orang-orang karena sifat dari hubungan nyata yang mereka miliki dengan saksi atau kolaborator keadilan berada dalam situasi berbahaya nyata, riil atau serius.

5. *Protected person* didefinisikan secara terpisah atau bersama-sama, justice collaborator, saksi dan orang lain yang dekat atau berhubungan dengan mereka berdasarkan definisi yang diberikan dalam huruf “a”, “b”, “c” dan “d”.
6. Situasi berbahaya didefinisikan sebagai situasi nyata, riil dan serius, dimana nyawa, kesehatan dan hak-hak dasar dan kebebasan yang diatur oleh hukum dan juga harta dan hak yang berkaitan dengannya, berada dalam bahaya.

Badan yang bertanggung jawab atas evaluasi persetujuan persiapan dan pelaksanaan tindakan khusus untuk perlindungan saksi dan *justice collaborator* di Albania adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Perlindungan Saksi dan *Justice Collaborator*
2. Komisi Evaluasi Tindakan Khusus Perlindungan Saksi dan *Justice Collaborator*

Langkah-langkah perlindungan khusus bagi saksi, *justice collaborator* dan keluarganya atau orang yang terkait erat adalah sebagai berikut:

*Pertama*; Mengubah identitas, *Kedua*; Mengubah tempat tinggal, *Ketiga*; Perlindungan sementara dan informasi, identitas, dan dokumen dari orang yang dilindungi, *Keempat*; Deklarasi dari saksi di bawah yang lain identitas dan administrasi mereka dengan cara khusus untuk perubahan suara, non penampilan dan bentuk lain yang ditetapkan hakim, *Kelima*; Tindakan fisik dan teknis khusus perlindungan, di tempat dimana orang yang dilindungi berada, serta transportasi, termasuk juga situasi di mana perlindungan tersebut diperlukan untuk pemenuhan kewajiban terhadap otoritas keadilan, *Keenam*; Perlindungan dan perlakuan khusus dalam kasus ketika *justice collaborator* telah ditempatkan di penjara sebagai langkah pengamanan pra siding atau dihukum dengan pidana penjara, *Ketujuh*; Rehabilitas social, *Kedelapan*; Pemeliharaan, perubahan tempat kerja dan pekerjaan sementara, *Kesembilan*; Bantuan keuangan dalam periode waktu, *Kesepuluh*; Pemberian saran dan bantuan hukum khusus.

### C. ITALIA.

Pengembangan program perlindungan saksi dan *justice collaborator* menurut *Fausto Zuccarelli* sebagian besar dihubungkan dengan munculnya “pentiti” (mereka yang bertobat). Tahun 1930 Italia mengatur kekebalan sebagian dari hukuman jika pelaku memperbaiki kerusakan yang diakibatkan perbuatan pidananya atau bekerja sama dengan pihak berwenang dalam kasus-kasus konspirasi politik atau yang berhubungan dengan kegiatan gangster.

Pada tahun 1970 munculnya suatu kekerasan dari Brigade Merah, kelompok teroris *Marxis-Leninis* mendorong berlakunya serangkaian aturan hukum untuk mendorong pemisahan diri dari kelompok teroris dan kerjasama dengan pihak berwenang. Baru pada tahun 1984 ketika *Mafioso Sisilia Tommaso Buscetta* menentang mafia dan memulai karirnya sebagai kolaborator hukum, perlindungan saksi dibentuk formil. Buscetta menjadi saksi dalam persidangan *Maxi* yang mengakibatkan 350 anggota mafia dihukum penjara. Berkat kerjasamanya dia direlokasikan dengan identitas baru, sehingga dengan kejadian tersebut mendorong lebih banyak lagi anggota mafia untuk bekerjasama yang hasilnya pada akhir 1990 penegak hukum Italia telah mendapatkan bantuan 1.000 (seribu) lebih *justice collaborator*.

Pada tanggal 15 Maret 1991 dilakukannya sebuah revisi terhadap Undang-undang Nomor 82. Salah satu komponen utama dari peraturan yang direvisi tersebut adalah untuk menciptakan suatu struktur kolaborator hukum yang terpisah dalam program perlindungan saksi. Ketentuan utama dalam Undang-undang Nomor 82 tertanggal 15 Maret 1991, sesuai amandemennya pada tahun 2001, adalah sebagai berikut:

1. Orang yang dapat menerima perlindungan adalah:
  - a. Saksi dan informan dalam perkara narkoba, mafia atau pembunuhan;
  - b. Saksi dari tindak pidana apapun yang memuat hukuman antara 5 sampai 20 tahun;
  - c. Individu yang dekat dengan kolaborator yang berada dalam bahaya.

2. Jenis perlindungan yang diberikan adalah:
  - a. “Rencana sementara” yang melibatkan relokasi dan nafkah untuk 180 hari;
  - b. “Upaya khusus” yang melibatkan rencana perlindungan dan integrasi social bagi individu yang direlokasikan;
  - c. “Program perlindungan khusus” yang memberikan relokasi, dokumen identitas, bantuan finansial dan )sebagai jalan terakhir) identitas hukum baru;
3. *Justice Collaborator* yang dijatuhkan pidana penjara perlu menjalankan setidaknya seperempat waktu hukuman atau, jika dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, 10 (sepuluh) tahun di penjara sebelum dirinya dimasukkan dalam program perlindungan;
4. Keputusan penerima dalam program perlindungan oleh komisis pusat yang terdiri dari:
  - a. Menteri Sekretaris Negara dalam Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Dua hakim atau penuntut umum;
  - c. Lima ahli dalam bidang kejahatan terorganisir;
5. Perubahan identitas perlu memperoleh izin dari Pusat Pelayanan Perlindungan yang bertanggung jawab atas implementasi dan penegakan upaya perlindungan.

#### **D. BELANDA.**

Hukum pidana Belanda didasarkan pada tradisi hukum kontinental. Hakim memiliki kewajiban positif dalam mencari kebenaran dan tidak pasif. Hakim memiliki tanggung jawab untuk mencari kebenaran dan hasil dari proses pidana. Konsekuensi lain dari sistem continental adalah posisi yang kuat dari kejaksan di semua tahap proses pidana. Prinsip utama dalam pengambilan keputusan Jaksa Penuntut Umum adalah prinsip kekuasaan diskresi (*opportunitas*), yang berarti bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak pernah diwajibkan untuk membawa kasus ke pengadilan, ia juga dapat menyelesaikan kasus itu sendiri atau memutuskan untuk mengabaikan kasus. Tugas Kejaksaan yang terpenting lainnya adalah bertanggung jawab melindungi hak-hak korban dan pelaku selama proses peradilan. Perjanjian

saksi di Belanda, Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan membuat suatu perjanjian hanya pada kasus-kasus kejahatan serius, yaitu dalam tindak pidana yang diancam delapan tahun penjara atau dugaan kejahatan yang diancam setidaknya empat tahun penjara dan yang dapat dianggap sebagai kejahatan terorganisir serius (pasal 226g nominal 1 PKC).

Penghargaan/reward kepada saksi dalam perjanjian saksi di Belanda adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan hukuman sampai maksimal 50% dari tuntutan jaksa jika mengembalikan keuntungan yang diperolehnya secara ilegal;
2. Transfer ke penjara lainnya.

## **2. Pengakuan (*Plea Bargaining*) Dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)**

Kitab Undang-undang hukum acara pidana yang merupakan ciptaan bangsa Indonesia menggantikan *Herziene Inlands Reglement* ciptaan kolonial. Dalam perjalanan lebih seperempat abad itu terjadi kemajuan teknologi terutama di bidang komunikasi dan transportasi yang membawa akibat di bidang sosial, ekonomi, dan hukum termasuk hukum pidana.

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHAP) menawarkan perubahan-perubahan medasar yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satunya dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) adanya suatu perubahan yang menarik yang diatur dalam Pasal 199 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHAP) yang disebut dengan jalur khusus. Sistem ini ini sudah lama berkembang di Negara-negara *Common Law* seperti Amerika Serikat yang disebut dengan sistem *Plea Bargaining*.

*Plea Bargaining* mengandung perjanjian antara penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya yang berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa. Penuntut umum setuju untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan dibandingkan dengan menempuh mekanisme persidangan yang merugikan

terdakwa karena kemungkinan mendapatkan hukuman yang lebih berat.<sup>14</sup> Praktik *Plea Bargaining* dilakukan dengan membuat suatu pernyataan bersalah atau disebut dengan *Plea Guilty* yang memberikan imbalan berupa pengurangan hukuman bagi terdakwa yang mengaku bersalah.<sup>15</sup>

*Plea Bargaining* muncul pada pertengahan abad ke 19 (Sembilanbelas) sebagai bentuk perlakuan khusus dikarenakan sistem peradilan pidana pada saat itu yang tidak efektif disebabkan banyaknya kasus yang mengakibatkan lamanya jangka waktu penyelesaian suatu perkara.<sup>16</sup> Landasan pokok yang menjadi dasar penuntut umum melakukan *Plea Bargaining* disebabkan beban perkara yang sangat besar sehingga menyulitkan kedudukan penuntut umum untuk bekerja secara efektif mengikat faktor waktu dan penuntut umum berpendapat bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil karena kurangnya bahan pembuktian.<sup>17</sup>

*Plea Bargaining* yang saat ini dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dengan nama Jalur Khusus diatur pada Pasal 199. *Plea bargaining* yang dimaksudkan di Indonesia adalah pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari tujuh tahun penjara, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari 2/3 dari maksimum.<sup>18</sup>

Jalur khusus dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dengan *Plea Bargaining* di Amerika Serikat terdapat perbedaan yang mendasar, *Plea Bargaining* di Amerika Serikat dapat

---

<sup>14</sup> F. Zimring & R. Frase. **The Criminal Justice System**. Little Brown Company, 1980, hlm. 498.

<sup>15</sup> Andrew Ashworth, **Sentencing and Criminal Justice third edition**, Buttersworth, hlm. 24.

<sup>16</sup> John H. Langbein (a), **Understanding The Short History Of Plea Bargaining**, (Yale Law School. 1979. Faculty Scholarship), hlm. 3.

<sup>17</sup> Atmasasmita Atmasasmita, Romli. **Sistem Peradilan Pidana. Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme**, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 112.

<sup>18</sup> Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, hal. 26

diaplikasikan dalam seluruh tindak pidana, mulai dari pelanggaran ringan hingga tindak pidana berat,<sup>19</sup> sedangkan dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHAP) dalam jalur khusus dapat dilakukan hanya pada tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara. Pembatasan terhadap ancaman pidana ini juga diterapkan di Spanyol dan Italia.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas di sinilah letak pengakuan yang memberikan suatu keuntungan (*plea bargaining*) bagi pelaku yang bekerjasama untuk dapat berkontribusi dalam mengungkap suatu tindak pidana. Penghargaan (*reward*) yang dapat diberikan kepada pelaku yang bekerjasama oleh Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHAP), dinilai lebih memberikan penghargaan yang lebih luas dan nyata dibandingkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang hanya menjelaskan keringanan pidana. Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHAP) ini memberikan suatu kepastian hukum dalam peringanan pidana, sehingga seorang saksi pelaku yang bekerjasama memberikan kontribusi yang baik dengan penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana.

## Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari permasalahan dalam penelitian tesis ini maka terdapat beberapa hal pokok yang dijadikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peringanan pidana dapat dijadikan alternatif dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia didasari adanya peringanan pidana sebagai *penghargaan (reward)* dalam mengungkap tindak pidana korupsi dapat menjadi salah satu dorongan seseorang pelaku tindak pidana yang bukan

---

<sup>19</sup> John H. Langbein (b), **Understanding The Short History Of Plea Bargaining**, (Yale Law School. 1979. Faculty Scholarship), hlm. 16. Prinsip shown beyond reasonable doubt bertujuan melindungi orang yang sebenarnya tidak bersalah, untuk itulah ia melandasi salah atau tidaknya seseorang dengan parameter minimum pembuktian, sedangkan prinsip factual adequate basis hanya berdasarkan kondisi

<sup>20</sup> Stephen C. Thaman, **Comparatice Criminal Procedure A Casebook Approach**, Durham North Carolina, Carolina Academic Press, Comparative Law, Series 2002., Hlm. 20. Di italia diatur bahwa Plea Bargaining dapat diaplikasikan hanya untuk tindak pidana yang ancamannya dibawah 3 tahun, spanyol 6 tahun dan di beberapa negara amerika latin hanya untuk tindak pidana ringan

merupakan pelaku utama (*justice collaborator*) untuk memberikan keterangan yang dapat membantu secara efektif dalam pengungkapan tindak pidana, dimana keterangan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) berkedudukan sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Kebijakan formulasi peringanan pidana bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam mengungkap tindak pidana korupsi di masa mendatang dapat dibuat dengan memperhatikan beberapa hal mendasar, yaitu: Pertama: Pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Kedua, *Plea Bargaining* dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP); dan Ketiga, beberapa pengaturan *Justice Collaborator* diberbagai Negara (Amerika Serikat, Albania, Italia dan Belanda), sehingga ditawarkan konsep kebijakan sebagai berikut:
  - (1) Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut: a). Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana; b). Mengakui kejahatan yang dilakukannya; c). Bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
  - (2) Jaksa penuntut umum didalam tuntutan nya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana.
  - (3) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dari penuntut umum.
  - (4) Hakim wajib:



- a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang diberikan dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada angka (3);
  - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
  - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada angka (3) diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- (5) Penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak boleh melebihi  $\frac{2}{3}$  dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.